IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Nazaruddin

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: The Implementation of Compulsory Education Policy 12 Years. This study aimed to analyze the implementation of compulsory education policy 12 years in Rokan Rokan Hulu Year 2012-2013 and analyze the cause of the Compulsory Education Policy Implementation 12 Years in Rokan Rokan Hulu Year 2012-2013 has not been as expected. The method used is a method of qualitative research by conducting interviews and documentation of the research object. The results of this study, the implementation of compulsory education policy 12 years in Rokan Hulu in accordance with the Regent of Rokan Hulu Regulation No. 11 of 2012 was in some ways already berlaksana, for example in the utilization of technology weapons and information. Schools in Rokan Hulu is now widely used fast internet network which will certainly facilitate schools in accessing information that can support teaching and learning process. Moreover, efforts to increase the number of teaching staff to ensure they can complete the education of 12 years is actually quite good, but these efforts actually be a boomerang for the funding of compulsory education to 12 years, it appeared that the budget that should ensure the learning process and free students from the addition of the cost of education, in fact widely used to pay Honorary Master. The cause of failure in compulsory education policy in Rokan Hulu in accordance with the decree of Rokan Hulu No. 11 of 2012 is due to a budget that is still lacking, Human Resources especially Teachers are still lacking, and school policies that often prevent the implementation of compulsory 12 this year.

Abstrak: Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun di Rokan Rokan Hulu Tahun 2012-2013 dan menganalisis penyebab Pelaksanaan Wajib Kebijakan Pendidikan 12 Tahun di Rokan Rokan Hulu Tahun 2012-2013 belum seperti yang diharapkan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dan dokumentasi dari objek penelitian. Hasil penelitian ini, implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Rokan Hulu sesuai dengan Bupati Peraturan Rokan Hulu Nomor 11 tahun 2012 dalam beberapa hal sudah berlaksana, misalnya dalam pemanfaatan senjata teknologi dan informasi. Sekolah di Rokan Hulu sekarang banyak digunakan jaringan internet yang cepat yang tentunya akan memudahkan sekolah dalam mengakses informasi yang dapat mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, upaya untuk meningkatkan jumlah staf pengajar untuk memastikan mereka dapat menyelesaikan pendidikan 12 tahun sebenarnya cukup baik, namun upaya ini benar-benar menjadi bumerang bagi pendanaan pendidikan wajib belajar 12 tahun, ternyata anggaran yang harus memastikan proses pembelajaran dan siswa bebas dari penambahan biaya pendidikan, sebenarnya banyak digunakan untuk membayar Guru Honorer. Penyebab kegagalan dalam kebijakan pendidikan wajib di Rokan Hulu sesuai dengan Perda Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2012 adalah karena anggaran yang masih kurang, Sumber Daya Manusia terutama guru masih kurang, dan kebijakan sekolah yang sering mencegah pelaksanaan dari wajib belajar 12 tahun ini.

Kata Kunci: wajib belajar, implementasi kebijakan, sekolah

PENDAHULUAN

Menjadi penting untuk menemukan suatu daerah otonom yang berhasil membangun kebijakan pendidikan, dan meletakkannya di dalam pembangunan kebijakan publik daerah. Temuan seperti ini dapat dijadikan sebagai acuan dan/ pembandingan (*benchmark*) bagi daerah lain di Indonesia untuk melakukan pembangunan pendidikan secara efektif, sekaligus menjadi modal untuk mencapai tujuan konstitusi “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Karena keterbatasan-

keterbatasan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka tidak semua daerah menunjukkan prestasi yang memuaskan di bidang pendidikan.

Begitu pentingnya peranan pendidikan dalam rangka mecerdaskan kehidupan bangsa maka pemerintah menetapkan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% baik pada anggaran APBN maupun APBD, kemudian dipahami bagaimana daerah tersebut mengembangkan kebijakan dibidang pendidikan daerah masing-masing sesuai dengan keuangan daerahnya.

Khususnya di Kabupaten Rokan Hulu, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Bupati No. 11 tahun 2012 tentang Wajib Belajar 12 tahun. Besaran APBD Rokan Hulu dari tahun 2012 hingga 2013 mengalami peningkatan sebagai komitmen pemerintah Rokan Hulu dalam menjalankan wajib belajar 12 tahun. Total keseluruhan APBD yang dikucurkan untuk Dinas Pendidikan dalam 2 tahun sebanyak Rp. 627.859.121.274,50. Jumlah yang sangat besar untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu. Di samping itu, jumlah guru yang tersedia juga menjadi acuan agar program wajib belajar 12 tahun ini berjalan.

Pelaksanaannya di lapangan, ternyata masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang pada gilirannya membuat pelaksanaan wajib belajar 12 tahun tidak sesuai dengan diharapkan. Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah banyaknya jumlah sekolah di Rokan Hulu yang mengalami kerusakan. Sekolah di Rokan Hulu dari tingkat SD hingga SMA/K pada tahun 2013 berjumlah 549, sebanyak 232 mengalami kerusakan sementara yang kondisinya baik sebanyak 317 Sekolah. Kondisi paling memprihatinkan adalah pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dimana dari 360 sekolah yang ada, sebanyak 138 yang kondisinya rusak. Ini tentu saja menjadi persoalan yang serius dalam upaya mewujudkan wajib belajar 12 tahun, sementara jenjang SD infrastrukturnya masih banyak yang rusak.

Edward III (1980) melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkannya guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu: Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan? Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Pendidikan berawal dari fakta bahwa manusia mempunyai kekurangan. Pendidikan merupakan jawaban untuk membuat manusia

menjadi lengkap. Dikatakan Rutz: “(Karena) setiap pribadi selalu mempunyai defisit (maka) pendidikan adalah suatu proses yang kompensatoris yang dapat membantu untuk sedapat-dapatnya menutupi defisit tersebut”. Pemahaman Rutz sebangun dengan P.J.Hill, yang memahami pendidikan sebagai proses belajar yang ditujukan sebagai membangun manusia dengan pengetahuan dan ketrampilan. Dikemukakan Hill sebagai berikut: “*education is a process of learning aimed at equipping people with knowledge and skill. There are to be enough to equip people sufficiently well so as enable them to live satisfactory to learn and pursue a career*”.

Pemahaman di atas memberikan arah bahwa pendidikan adalah sebuah kegiatan yang melekat kepada kehidupan bersama atau dalam bahasa politik disebut sebagai “*negar-bangsa*” dalam rangka menjadikan kehidupan bersama tersebut mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan kehidupannya. Mengingat peran strategisnya, maka pendidikan perlu ditata dan dikembangkan oleh negara.

Dengan pemahaman yang sama dapat dipahami pemahaman tentang pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sisdiknas, sebagai berikut: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun di Rokan Rokan Hulu Tahun 2012-2013 dan menganalisis penyebab Pelaksanaan Wajib Kebijakan Pendidikan 12 Tahun di Rokan Rokan Hulu Tahun 2012-2013.

METODE

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan data yang didapat dari hasil pengamatan

dan tujuannya mempertegas serta memperkuat suatu teori, hingga memperoleh informasi mengenai keadaan suatu saat sekarang. Informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan kemampuan orang-orang yang dijadikan informan tersebut dalam memberikan informasi yang valid. Adapun teknik analisa yang digunakan teknik deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan gejala dan permasalahan yang timbul di lapangan kemudian dilakukan interpretasi secara kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksana Kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Rohul direalisasikan dengan program wajib belajar 12 tahun. Aktor kebijakan publik dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun yang menentukan langkah berbuat atau tidak berbuat sebagaimana yang dijelaskan dalam teori kebijakan Thomas R. Dye yang sudah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rohul melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga beserta dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. SKPD terkait diantaranya adalah Bappeda yang bertugas menganggarkan, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Biro Kesejahteraan Sosial dan Dinas Sosial. Masing-masing tugas dilaksanakan sesuai dengan politik hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rohul.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. SKPD ini mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, serta melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Guru

Guru-guru di sekolah juga menjadi aktor dalam menentukan efektivitas kebijakan wajib belajar 12 tahun. Peran para guru ini adalah dengan memberikan motivasi kepada anak didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka juga dapat merekomendasikan siswa yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan dengan program beasiswa. Pihak sekolah juga dapat mengeluarkan kebijakan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu agar terhindar dari putus sekolah.

Masyarakat

Salah satu asas dan pendekatan pembangunan secara reformasi ini adalah partisipasinya pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, keterlibatan masing-masing dalam proses pembangunan sangat penting artinya sebagai upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna bagi masyarakat. Dalam arti luas aktor kebijakan publik adalah masyarakat. Masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan dari sejumlah orang yang tergabung dalam suatu kelompok yang berada dalam suatu tempat tertentu. Kelompok tersebut kemudian membuat suatu karakteristik dan memiliki norma-norma untuk mengatur kehidupannya.

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang mempunyai identifikasi sendiri yang membedakan dengan kelompok lain dan hidup di dalam wilayah atau daerah tertentu secara tersendiri. Kelompok ini, baik sempit maupun luas mempunyai kesadaran akan adanya persatuan di antara kelompok itu sebagai hasil dari proses interaksi. Sekelompok orang dapat dikatakan sebagai masyarakat jika di dalamnya ada proses saling ketergantungan dan membutuhkan satu sama lain.

Pembangunan dilaksanakan pada hakekatnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga peran masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan program pembangunan adalah sangat penting. Partisipasi masyarakat meliputi beberapa hal seperti pikiran, tenaga, barang atau

jasa, uang, keahlian dan pengetahuan. Dalam konteks pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, masyarakat sangat menentukan keberhasilan program ini melalui cara pandang mereka terhadap arti penting pendidikan. Tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan akan meningkatkan tingginya partisipasi sekolah.

Upaya yang Dilakukan agar Program Ini Berhasil

Sejarah telah membuktikan bahwa hanya dengan pendidikan yang bermutu, dapat menunjang proses pencerdasan kehidupan bangsa. Bahkan UNESCO dalam studinya yang akhirnya merekomendasi pendidikan untuk abad ke-21, menemukan bahwa kebanyakan Negara berkembang mengutamakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan (*education for all*) tetapi masih mengabaikan mutu, akibatnya pendidikan tidak berpengaruh kepada kemajuan bangsa.

Arah kebijakan pembangunan pendidikan di Rohul memperhatikan dua hal, yakni kuantitas dan kualitas pendidikan. Pembangunan pendidikan memang harus memperhatikan mutu sehingga kualitas pendidikan dan mutu lulusan dapat bersaing dalam dunia kerja maupun ketika ia akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, ia sudah memiliki modal yang besar untuk bersaing dengan lulusan dari daerah lain.

Kebijakan wajib belajar 12 tahun yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rohul mempercepat tercapainya empat tujuan dasar pendidikan. Nowak menyimpulkan bahwa terdapat empat tujuan dasar pendidikan yang telah disepakati secara universal:

1. memungkinkan umat manusia secara bebas mengembangkan kepribadian dan martabatnya;
2. memungkinkan umat manusia berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang bebas dalam semangat saling bertoleransi dan penghormatan pada peradaban, kebudayaan, dan agama lain;
3. untuk mengembangkan penghormatan kepada orang tua, nilai kebangsaan dan lingkungan alam;
4. mengembangkan penghormatan pada hak asasi manusia, kebebasan dasar dan pemeliharaan perdamaian.

Peningkatan Angka Melek Huruf dan Tidak Diskriminatif

Pendidikan akan menentukan tingkat peradaban hidup manusia. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan menjadi wacana penting dalam pembangunan pendidikan di Rohul. Penekanan pada pemberian pendidikan untuk semua dan dengan demikian akses ke pendidikan merupakan isu utama. Pendidikan harus tersedia untuk semua tanpa diskriminasi. Konsep non-diskriminasi dalam pendidikan juga dijelajahi dengan lebih rinci di Konvensi UNESCO tahun 1960 yakni Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan Konvensi tersebut merupakan komitmen internasional untuk memerangi tindakan diskriminatif. Konsep non diskriminasi adalah konsep hukum memiliki arti penting dalam penyelesaian permasalahan pendidikan.

BPS sebagai lembaga penyedia data dalam perencanaan statistik berusaha melaksanakan kegiatan statistik, salah satunya adalah dengan menyediakan data tentang kondisi pendidikan di Rohul. Berdasarkan hasil penghitungan data terdapat antara laki-laki dan perempuan menunjukkan *trend* yang sama. *Trend* menunjukkan angka partisipasi pendidikan perempuan selalu lebih rendah dari laki-laki. Ini sebenarnya tidak jadi persoalan, namun keberpihakan kepada laki-laki untuk bersekolah lebih didahulukan mungkin jadi penyebabnya.

Jumlah akses pendidikan berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2012 dari tingkat TK sampai tingkat SMA/ sederajat didominasi oleh laki-laki dibanding perempuan. Berdasarkan data tersebut, hanya tingkat yang perempuan melebihi laki-laki, seterusnya hingga SMA/ sederajat selalu lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Total keseluruhan laki-laki sebanyak 1.458, perempuan 11.454, selisih lebih dari 1000.

Dilihat dari persentase angka melek huruf Kabupaten Rokan Hulu, persentase angka melek huruf dari tahun 2012 sampai 2013 mengalami peningkatan, meskipun peningkatan itu sangat kecil. Angka melek huruf di Kabupaten Rokan Hulu sangat tinggi, yakni telah mencapai 98%. Sementara rata-rata lama sekolah di Rokan Hulu adalah 7,9 tahun, artinya rasio ini dipengaruhi oleh penduduk yang telah berusia lanjut yang

dulunya tidak sekolah. Maka dari itu diperlukan program wajib belajar 12 tahun agar rasio nantinya bisa mencapai 100%.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi kini dipergunakan di sekolah-sekolah. Pada jenjang pendidikan SMA/MA dan SMK, teknologi informasi dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran dan juga menjadi salah satu ekstrakurikuler. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai indikator dalam program wajib belajar 12 tahun ini tidak lepas dari pemenuhan hak atas informasi. Hak informasi menjadi pembuka jendela peradaban dan pengembangan kondisi demokratisasi di dunia pendidikan hingga sektor strategis lainnya. Dengan demikian, hak informasi ini dipenuhi melalui pendidikan. Sistem penilaian dan media pembelajaran terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penerapan *e-learning*. Beberapa sekolah sudah menyiapkan *wifi* dan komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet, namun pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran ini belum merata pada sekolah-sekolah di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran sekolah untuk menyediakan perangkat teknologi informasi dan keterbatasan jaringan internet sampai ke pelosok desa.

Peningkatan Angka Partisipasi

Di Kabupaten Rokan Hulu, selain dari jumlah anak yang bersekolah, angka partisipasi dapat juga dinilai dari banyaknya jumlah anak yang putus sekolah. Artinya dapat dilihat bahwa pengukuran keberhasilan program pendidikan juga harus memperhatikan pemerataannya. Jumlah anak putus sekolah di Kabupaten Rokan Hulu saat Program Wajib Belajar 12 Tahun mulai berjalan pada tingkat SD/MI sebanyak 131 anak atau 0,17% dari 75.025 murid. Sementara pada tingkat SMP/MTs berjumlah 601 siswa atau 2,49% dari 24.098 siswa. Dan pada tingkat SMA/SMK/MA terdapat 497 siswa putus sekolah atau 3,23 % dari 15.390 Siswa. Ini tentu saja sangat memprihatinkan meskipun banyak penyebab yang melatarbelakanginya.

Seiring dengan kemajuan zaman maka pendidikan menengah menjadi hal yang diwajibkan. Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun merupakan realisasi politik hukum pemerintah daerah dalam memenuhi hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan sesuai dengan teori positivis dalam HAM adalah hak asasi manusia karena tercantum dalam hukum positif. Kebijakan wajib belajar 12 tahun telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sejak tahun 2008 dengan berlandaskan pada konsep otonomi daerah. Secara nasional kebijakan wajib belajar 12 tahun ini baru dicanangkan pada tahun 2013. Otonomi daerah di bidang pendidikan ini sejalan dengan otonomi pendidikan.

Otonomi pendidikan dipandang sebagai proses kemandirian sebuah sekolah (lembaga) dalam mengelola segenap sumber daya yang ada. Hal ini berarti kebijakan pemerintah di bidang pendidikan berada pada dua aspek yakni aspek kualitas dan aspek kuantitas. Aspek kuantitas ini dapat dilihat dari semakin meluasnya akses pendidikan bagi semua orang. Meluasnya akses pendidikan dapat diukur dari partisipasi siswa dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Pengertian tentang partisipasi secara formal adalah turut sertanya seseorang, baik secara fisik maupun psikis dalam memberikan kontribusi pada proses pembuatan keputusan mengenai persoalan di mana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukannya. Keterlibatan ini dilakukan oleh seseorang di dalam lingkungan komunitasnya. Tingkat efektivitas pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dicerminkan dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid sekolah usia tertentu dengan jumlah penduduk usia tertentu. Perhitungan angka partisipasi sekolah dapat dibagi menjadi dua yakni angka partisipasi kasar dan angka partisipasi mumi.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk

yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK dapat dihitung dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dari Keterangan Pendidikan.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Rokan Hulu sesuai dengan Bupati Peraturan Rokan Hulu Nomor 11 tahun 2012 dalam beberapa hal sudah terlaksana. Misalnya dalam pemanfaatan senjata teknologi dan informasi. Sekolah di Rokan Hulu sekarang banyak digunakan jaringan internet yang cepat yang tentunya akan memudahkan sekolah dalam mengakses informasi yang dapat mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, upaya untuk meningkatkan jumlah staf pengajar untuk memastikan mereka dapat menyelesaikan pendidikan 12 tahun sebenarnya cukup baik, namun upaya ini benar-benar menjadi bumerang bagi pendanaan pendidikan wajib belajar 12 tahun, ternyata anggaran yang harus memastikan proses pembelajaran dan siswa bebas dari penambahan biaya pendidikan, sebenarnya banyak digunakan untuk membayar Guru Honorer. Penyebab kegagalan dalam kebijakan pendidikan wajib di Rokan Hulu sesuai dengan Perda Rokan Hulu Nomor 11 Tahun 2012 adalah karena anggaran yang masih kurang, Sumber Daya Manusia terutama guru masih kurang, dan kebijakan sekolah yang sering mencegah pelaksanaan dari wajib belajar 12 tahun ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Badjuri dan Yuwono, 2002. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*, Semarang: UNDIP Press
- Hoogerwerf, Dennis, 2001. *Implementasi Kebijakan Pemerintah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Keban, T, Yeremias, 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media
- Leo Agustino, 2006, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- M. Nazir, 2008. *Motode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Mizan
- Riant Nugroho D., 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang Modelmodel Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Syafaruddin, 2008, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, Jakarta: Rineka Cipta
- Tangkilisan, Hessel Nogi, 2003, *Evaluasi Kebijakan Publik: Penjelasan, Analisis & Transformasi Pikiran Nagel*, Yogyakarta: Balairung & Co
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta
- William NDunn, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Winardi, Ahmadi. 2001. *Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Rineka Cipta